



## Implementasi Program Sekolah Rakyat di Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya

Brilliant Khoirul Hanafi<sup>1</sup>, Ika Ayu Fitriani<sup>2</sup>, Prita Aulia Fitriani<sup>3</sup>, Nanda Devi Aqnesia Soni<sup>4</sup>, Maura Dwi Anggita Putri<sup>5</sup>, Ardiyansah<sup>6</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia<sup>1-6</sup>

Email Korespondensi: [24040674010@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674010@mhs.unesa.ac.id), [24040674021@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674021@mhs.unesa.ac.id), [24040674022@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674022@mhs.unesa.ac.id), [24040674036@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674036@mhs.unesa.ac.id), [24040674025@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674025@mhs.unesa.ac.id), [ardiyansah@unesa.ac.id](mailto:ardiyansah@unesa.ac.id)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

### ABSTRACT

The People's School Program (Sekolah Rakyat) is a national priority policy established by Presidential Instruction No. 8 of 2025, aiming to provide free boarding education for children from extremely poor families. This study examines the implementation of the SR program at SRMA 21 Surabaya, located in Lidah Wetan Village, Lakarsantri District, Surabaya City. Using a descriptive qualitative approach with George C. Edwards III's (1980) policy implementation framework, the study evaluates four variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through in-depth interviews with six informants, direct observation, and document analysis. Findings indicate that the program runs effectively despite several challenges. Communication from the central government to implementers occurred through personal appointments without structured socialization; human resources and facilities were adequate but temporary; implementers' disposition was strongly positive and became the program's main strength; while inter-agency coordination experienced fragmentation resulting in overlapping assistance. The study recommends strengthening hierarchical communication mechanisms, accelerating permanent building construction, and establishing a centralized inter-agency coordination forum.

**Keywords:** Policy implementation, people's school program, Edwards III, inclusive education, poverty

### ABSTRAK

Program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan prioritas nasional yang didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, bertujuan memberikan pendidikan berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Penelitian ini mengkaji implementasi program SR di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 21 Surabaya yang berlokasi di Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka analisis teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980), penelitian ini mengevaluasi empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan enam informan, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program berjalan cukup efektif meski menghadapi sejumlah tantangan. Komunikasi dari pusat ke pelaksana berlangsung melalui penunjukan personal tanpa sosialisasi terstruktur, sumber daya manusia dan fasilitas memadai namun masih bersifat sementara, disposisi para pelaksana sangat positif dan menjadi kekuatan utama program, sedangkan

---

*koordinasi lintas dinas masih mengalami fragmentasi yang mengakibatkan tumpang tindih bantuan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme komunikasi berjenjang, percepatan pembangunan gedung permanen, dan pembentukan forum koordinasi terpusat lintas instansi.*

**Kata Kunci:** *Implementasi kebijakan, sekolah rakyat, Edwards III, pendidikan inklusif, kemiskinan*

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945 Pasal 31 (1) Tentang Pendidikan Dan Kebudayaan, 1945. Namun dalam kenyataannya, akses pendidikan bagi kelompok prasejahtera masih menjadi persoalan serius. Data BPS Kota Surabaya (2024) menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok usia 7-15 tahun sudah mendekati 100 persen, tetapi pada kelompok usia 16-18 tahun angkanya hanya sekitar 70 persen. Rata-rata lama sekolah penduduk Surabaya pada tahun 2025 adalah 11,15 tahun, yang berarti rata-rata penduduk belum menamatkan pendidikan menengah atas. Kesenjangan ini bukan semata-mata persoalan akses fisik, tetapi lebih pada hambatan ekonomi yang sistemik. Data Susenas (2021) mencatat bahwa 76 persen keluarga mengakui alasan ekonomi sebagai penyebab utama anak putus sekolah, sementara 74,51 persen kepala rumah tangga miskin ekstrem hanya berpendidikan SD ke bawah. Kondisi ini menempatkan kemiskinan dan kualitas pendidikan dalam lingkaran setan yang sulit diputus tanpa intervensi kebijakan yang terarah.

Merespons kondisi tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Kemiskinan Ekstrem yang menginstruksikan penyelenggaraan pendidikan berasrama gratis melalui Program Sekolah Rakyat (SR), mencakup jenjang SD hingga SMA. Program ini secara resmi beroperasi sejak 14 Juli 2025. Di Kota Surabaya, tindak lanjutnya dituangkan dalam Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/111/436.1.2/2025 Tentang Penetapan Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025/2026., 2025. Hingga April 2026, program ini telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi.

Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 21 Surabaya yang berlokasi di Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri merupakan salah satu dari 63 titik pertama yang mulai beroperasi. Sebagai program baru yang melibatkan kolaborasi lintas sektor, SRMA 21 menarik untuk dikaji dari perspektif implementasi kebijakan publik. Kajian akademis tentang program ini di Kota Surabaya masih sangat terbatas (Muharam & Kurniawan, 2025), sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Program Sekolah Rakyat di SRMA 21 Surabaya menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards (1980) yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kerangka ini dipilih karena paling relevan untuk menganalisis implementasi program sosial yang baru berjalan dan melibatkan banyak aktor kelembagaan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami implementasi program secara mendalam proses implementasi Program Sekolah Rakyat di Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, serta menggambarkan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh para pelaksana di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan sebagai tahap awal penelitian kualitatif untuk memahami kondisi lapangan secara langsung dan memperoleh gambaran nyata terkait implementasi Program Sekolah Rakyat tanpa mengubah kondisi asli di lapangan. Observasi dilakukan di Sekolah Rakyat yang berlokasi di Lidah Wetan, Surabaya, guna memperoleh data mengenai pelaksanaan layanan pendidikan bagi kelompok prasejahtera. Selain itu, wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari informan yang terlibat dalam pelaksanaan program melalui pertanyaan yang disusun sesuai fokus penelitian. Wawancara dilakukan secara sistematis melalui tahap pembukaan, proses inti, dan penutupan agar data yang diperoleh lebih terarah. Penelitian ini juga menggunakan studi literatur melalui berbagai sumber tertulis seperti artikel jurnal, berita, dan dokumen institusi terkait Program Sekolah Rakyat untuk memperkuat data penelitian dan membantu peneliti memahami fenomena yang diteliti secara lebih mendalam (Morgan, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Komunikasi*

(Edwards III, 1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan transmisi informasi yang jelas (*clarity*), konsisten (*consistency*), dan menyeluruh (*transmission*) dari pembuat kebijakan kepada para pelaksana di lapangan. Temuan menunjukkan bahwa penyampaian informasi kepada pelaksana tingkat sekolah dilakukan melalui penunjukan personal secara langsung, bukan melalui sosialisasi terstruktur dan berjenjang. Kepala SRMA 21 Surabaya, Ibu Prapti Wardani, menyatakan bahwa dirinya baru mengetahui tentang Program Sekolah Rakyat setelah dipanggil dan langsung ditugaskan sebagai kepala sekolah, tanpa didahului sosialisasi yang terencana. Mekanisme yang berbeda ditemukan untuk rekrutmen tenaga pengajar, di mana sebagian besar guru direkrut melalui jalur P3K yang lebih formal, meski prosesnya berlangsung dalam tempo yang sangat singkat akibat tekanan peluncuran program.

Kondisi ini selaras dengan temuan Muharam & Kurniawan (2025) di SRMA 10 Jakarta Selatan, di mana komunikasi lintas kementerian pada fase awal implementasi belum berjalan optimal. Dalam perspektif Edwards III, ketika instruksi tidak disampaikan secara terstruktur, pelaksana cenderung mengisi kekosongan tersebut dengan keputusan personal. Meskipun demikian, para pelaksana SRMA 21 mampu membangun pemahaman operasional secara mandiri melalui pendekatan *learning by doing*, yang menurut (O'toole, 2000) merupakan indikator kapasitas institusional yang cukup kuat. Pada dimensi penyebaran informasi kepada masyarakat sasaran, program merancang mekanisme sosialisasi

*door-to-door* melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) kepada keluarga desil 1 dan 2 DTSEN. Namun temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian peserta didik justru memperoleh informasi program melalui komunikasi informal antarwarga, di mana program ini direkomendasikan dari mulut ke mulut dengan menghubungi dan menyampaikan tentang adanya kuota. Hal ini menguatkan argumen Rohani et al. (2026) bahwa mekanisme sosialisasi formal masih perlu diperkuat agar benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Satu-satunya dimensi komunikasi yang berjalan baik adalah konsistensi informasi di tingkat operasional harian. Mekanisme apel pagi, koordinasi digital via pesan, dan buku saku peraturan bagi siswa memungkinkan pemantauan kondisi peserta didik secara real-time. Konsistensi komunikasi operasional semacam ini, menurut Hill & Hupe (2002) dapat menjadi faktor penyeimbang yang mencegah program tergelincir lebih jauh meski komunikasi awal dari pusat belum optimal.

### 1. Sumber Daya

Edwards III (1980) menegaskan bahwa implementasi yang baik membutuhkan sumber daya yang memadai, mencakup sumber daya manusia (SDM), anggaran, fasilitas, dan kewenangan. Dari sisi SDM, SRMA 21 Surabaya dikelola oleh 51 tenaga (1 kepala sekolah, 17 guru, 27 staf dan tenaga kependidikan, 4 wali asrama, dan 10 wali asuh) untuk melayani 99 peserta didik. Pemenuhan SDM secara keseluruhan baru mencapai 80–90 persen dari kebutuhan ideal. Kekurangan pada mata pelajaran spesifik seperti agama Kristen dan bahasa Jawa diatasi melalui inisiatif mandiri kepala sekolah berkoordinasi dengan Lab School UNESA, tanpa menunggu pengisian formasi dari pusat. Tantangan yang lebih berat muncul dari karakteristik peserta didik, di mana dari 99 siswa, hanya 5 yang memiliki skor IQ di atas 100, sementara beberapa siswa menunjukkan tanda disabilitas intelektual. Kondisi ini menuntut kompetensi pedagogis khusus yang belum seluruhnya tersedia.

Fasilitas operasional menggunakan gedung UNESA dengan sistem sewa sementara, karena gedung permanen di Kedung Cowek masih dalam proses pembangunan. Fasilitas kelas termasuk bangku, papan tulis, dan smartboard disediakan UNESA, sementara pemerintah menyediakan kebutuhan dasar siswa secara lengkap, seperti seragam, pakaian harian, perlengkapan belajar termasuk laptop, konsumsi tiga kali sehari, sprei, bantal, lemari, dan meja belajar di asrama. Seluruh kebutuhan ini ditanggung sepenuhnya sehingga peserta didik dari keluarga desil 1 dan 2 dapat mengikuti program tanpa beban biaya apapun.

Dari aspek anggaran, program ini dialokasikan dana sebesar Rp24,9 triliun dari APBN melalui Kementerian Sosial, dengan mekanisme pengelolaan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) guna menjamin akuntabilitas. Pada fase awal, pencairan anggaran mengalami keterlambatan yang cukup signifikan. Kekosongan ini ditutup secara proaktif oleh berbagai instansi daerah Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Perpustakaan Nasional, hingga UNESA yang memberikan dukungan operasional secara mandiri. Respons adaptif

ini mencerminkan mekanisme joint action antar-lembaga sebagaimana dikonseptualisasikan oleh (Pressman & Wildavsky, 1984).

## 2. Disposisi

Disposisi adalah variabel yang justru menjadi kekuatan terbesar implementasi Program Sekolah Rakyat di SRMA 21 Surabaya. Edwards III (1980) menegaskan bahwa disposisi yang positif dari para pelaksana dapat mengkompensasi berbagai keterbatasan sumber daya dan komunikasi.

Di tingkat pimpinan, Kepala SRMA 21 menunjukkan pola kepemimpinan proaktif yang melampaui tuntutan administratif formal. Inisiatif mencari guru agama Kristen dan bahasa Jawa ke Lab School UNESA secara mandiri mencerminkan orientasi pelayanan tinggi (*service orientation*) yang oleh Lipsky (1984) disebut sebagai ciri street-level bureaucrats yang memiliki motivasi intrinsik tinggi. Pola ini kontras dengan kecenderungan birokrasi Indonesia yang menunggu instruksi dari atas (*wait-and-see*), sebagaimana dikritisi oleh (Dwiyanto, 2018).

Di tingkat guru, Bu Ima menghadapi tantangan structural, yakni mengajar siswa dengan rentang kemampuan kognitif yang sangat lebar. Komitmennya diwujudkan melalui kesediaan mengulang materi, menyesuaikan kecepatan pengajaran, dan memberikan perhatian individual kepada setiap siswa. Pendekatan ini selaras dengan konsep adaptive teaching (Mujis et al., 2012) yang terbukti paling efektif dalam konteks sekolah dengan populasi rentan.

Di tingkat wali asuh, Pak Subekti menjalankan tugasnya jauh melampaui kewajiban formal: membangunkan siswa sebelum subuh, mendampingi salat berjamaah, memantau kesehatan setiap pagi, mengecek kebersihan kamar, dan memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis siswa, termasuk memahami mengapa sebagian siswa memilih tidak pulang ke rumah saat akhir pekan. Komitmen semacam ini merepresentasikan dimensi *personal dedication* yang menurut Day (2004) merupakan prediktor terkuat kualitas pengajaran pada sekolah yang melayani populasi rentan.

Dari sisi peserta didik, respons umumnya positif. Kehidupan asrama 24 jam dinilai memberikan pengalaman sosial baru yang menyenangkan: interaksi intens dengan teman sebaya, rutinitas kolektif, dan berbagai kegiatan bersama. Di sisi lain, kepadatan jadwal harian menimbulkan rasa jenuh pada sebagian siswa, yang diatasi melalui pemberian akses handphone pada akhir pekan. (Ryan & Deci, 1985) mengingatkan bahwa jadwal yang terlalu kaku dapat mengikis motivasi intrinsik jangka panjang, sehingga keseimbangan antara struktur dan fleksibilitas perlu diperhatikan ke depan.

## 3. Struktur Birokrasi

Edwards III (1980) menyatakan bahwa struktur birokrasi yang baik mencakup dua elemen: SOP yang jelas sebagai panduan teknis pelaksanaan, dan mekanisme koordinasi antar-instansi yang tidak terfragmentasi.

Dari sisi SOP, kehidupan asrama di SRMA 21 diatur secara ketat dan terstruktur. Seluruh siswa wajib berada di kamar pukul 21.00 WIB, tidak diperbolehkan meninggalkan area asrama setelah Isya, dan setiap aktivitas keluar

harus didampingi wali asuh. SOP ini diterjemahkan ke dalam aturan teknis internal yang lebih spesifik dari SOP umum Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Rakyat, 2025 sebuah adaptasi kontekstual yang menurut Deleon & Deleon (2013) justru merupakan ciri implementasi yang berhasil selama orientasi pada tujuan kebijakan tetap terjaga.

Sistem sanksi diterapkan secara berjenjang: pelanggaran ringan (keterlambatan) diatasi dengan pembinaan seperti membaca sholawat bersama, pelanggaran lebih serius berujung pada penyitaan *handphone*, dan pelanggaran berat seperti bullying dapat berujung pada pengeluaran dari program. Pendekatan ini menekankan pembentukan kesadaran dan kedisiplinan daripada hukuman fisik. Temuan Kinanti (2025) memperkuat bahwa pemahaman siswa terhadap tata tertib asrama memiliki hubungan positif dengan tingkat kedisiplinan.

Pada dimensi koordinasi lintas instansi, program ini melibatkan jaringan yang luas: Kemensos, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Kota Surabaya, Dinas Pendidikan, dan UNESA. Kolaborasi dengan UNESA bahkan menghasilkan program konkret bagi siswa, yakni adanya program sister school ke Thailand yang seluruh biayanya ditanggung UNESA, membuka akses pengalaman internasional bagi siswa dari keluarga prasejahtera.

Namun di balik capaian tersebut, ditemukan persoalan serius seperti bantuan dari berbagai instansi mengalir tanpa koordinasi yang terintegrasi, menghasilkan tumpang tindih, sementara kebutuhan yang lebih mendesak mungkin belum terpenuhi. Selain itu, program belum memiliki MoU formal dengan sektor swasta, membatasi akses terhadap sumber daya dan inovasi di luar ekosistem pemerintah.

Persoalan ini merupakan manifestasi klasik dari fragmented bureaucracy dalam perspektif Edwards III (1980) di mana banyak aktor dengan niat baik, tetapi tanpa mekanisme koordinasi yang memadai. Bouckaert et al., (2010) menegaskan bahwa ketiadaan mekanisme *whole-of-government* yang efektif merupakan salah satu penyebab utama kegagalan program lintas sektoral. Pembentukan forum koordinasi terpusat atau penunjukan network manager (Agranoff & McGuire, 2003) yang mengelola seluruh aliran bantuan menjadi rekomendasi mendesak.

**Tabel 1. Ringkasan Temuan Implementasi Berdasarkan Variabel Edwards III**

Variabel	Capaian	Tantangan
<b>Komunikasi</b>	Konsistensi informasi transmisi dari pusat ke pelaksana operasional harian berjalan melalui penunjukan personal yang baik (apel, buku, sosialisasi ke masyarakat melalui koordinasi digital)	bergantung pada jaringan informasi
<b>Sumber Daya</b>	Kebutuhan dasar SDM baru 80-90% ideal, fasilitas terpenuhi penuh, anggaran masih bersifat sementara (sebagian besar dari APBN), fasilitas keterlambatan pencairan anggaran kelas dan asrama memadai awal	
<b>Disposisi</b>	Komitmen tinggi di sebagian siswa mengalami jenjang level: kepala sekolah proaktif akibat kepadatan jadwal; pengajar adaptif, wali asuh pe	

	dedikasi; respons umumnya positif	si; keseimbangan fleksibilitas	struktur
<b>Struktur Birokrasi</b>	SOP asrama terstruktur diterapkan konsisten, sanksi berjenjang, dengan menghasilkan internasional	Fragmentasi sis; tumpang tindih MoU formal dengan UNI progi	koordinasi lintas bantuan, belum dengan sektor swasta

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian terkait Implementasi Program Sekolah Rakyat di SRMA 21 Surabaya telah berjalan secara efektif meskipun menghadapi berbagai tantangan yang wajar pada program yang baru memasuki tahun pertama operasional. Dari keempat variabel Edwards III (1980), disposisi para pelaksana terbukti menjadi kekuatan utama yang menopang keberhasilan program di tengah keterbatasan sistem formal. Komunikasi dari pusat ke pelaksana perlu diperkuat melalui mekanisme sosialisasi yang terstruktur dan berjenjang, bukan sekadar penunjukan personal. Sosialisasi kepada masyarakat sasaran juga perlu diperkuat agar kelompok yang paling membutuhkan yang justru paling terisolasi dari jaringan informasi dapat terjangkau secara merata. Sumber daya fisik dan anggaran relatif memadai, namun percepatan pembangunan gedung permanen dan penyediaan tenaga pengajar berkompentensi khusus menjadi prioritas jangka menengah. Struktur birokrasi membutuhkan reformasi paling mendasar yakni fragmentasi koordinasi lintas dinas harus diatasi melalui pembentukan forum koordinasi terpusat atau penunjukan koordinator jaringan yang memiliki otoritas untuk mengelola seluruh aliran bantuan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan satu satuan pendidikan dan jangka waktu yang relatif singkat (Maret–Mei 2026), sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi ke seluruh lokasi Sekolah Rakyat. Penelitian selanjutnya disarankan mencakup lebih banyak satuan pendidikan dan mengkaji dampak jangka panjang program terhadap kondisi sosial-ekonomi peserta didik dan keluarganya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative public management: New strategies for local governments*. Georgetown University Press.
- Bouckaert, G., Peters, B. G., & Verhoest, K. (2010). *Coordination of public sector organizations*. Springer.
- Day, C. (2004). *A Passion for Teaching*.
- Deleon, P., & Deleon, L. (2013). *What Ever Happened to Policy Implementation? An Alternative Approach* Downloaded from. <http://jpart.oxfordjournals.org/>
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen pelayanan publik: peduli inklusif dan kolaborasi*. UGM press.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press. <https://books.google.co.id/books?id=nQtHAAAAMAAJ>

- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing public policy: Governance in theory and in practice*. Sage.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Kemiskinan Ekstrem, BPK RI (2025).
- Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/111/436.1.2/2025 Tentang Penetapan Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025/2026., JDIH Pemerintah Kota Surabaya (2025).
- Kinanti, T. K. (2025). *Hubungan antara Pemahaman Tentang Tata Tertib Asrama dan Kedisiplinan Siswa Asrama*. <https://afeksi.id/jurnal/index.php/afeksi>
- Lipsky, M. (1984). *Bureaucratic Disentitlement i n Social Welfare Programs*. <https://doi.org/10.1086/644161>
- Morgan, D. L. (2018). *Basic and advanced focus groups*. Sage Publications.
- Muharam, K. I., & Kurniawan, T. (2025). Implementasi Kebijakan Program Sekolah Rakyat Kementerian Sosial RI (Studi Kasus: Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan). *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. <https://doi.org/10.33007/ska.v15i1.3739>
- Mujis, Daniel, Chapman, Armstrong, & Paul. (2012). Teach first : pedagogy and outcomes. The impact of an alternative certification programme. : : *Journal for Educational Research Online* 4 (2012) 2, S. 29-64. <https://doi.org/DOI:10.25656/01:7480>
- O'toole, L. J. (2000). *Research on Policy Implementation: Assessment and Prospects*.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Rakyat, BPK RI (2025).
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland; Or, why it's amazing that federal programs work at all, this being a saga of the Economic Development Administration as told by two sympathetic observers who seek to build morals on a foundation* (Vol. 708). Univ of California Press.
- Rohani, R., Akbariah, E., Maisyaroh, M., & Novaria, E. (2026). POTENSI DAN TANTANGAN PROGRAM SEKOLAH RAKYAT DALAM KONTEKS PENCAPAIAN SDGS PENDIDIKAN DI INDONESIA. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 6(1), 30-38. <https://doi.org/10.51878/academia.v6i1.8965>
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (1985). *Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being Self-Determination Theory*. Ryan.
- UUD NRI 1945 Pasal 31 (1) Tentang Pendidikan Dan Kebudayaan , DPR RI (1945).